

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Setdakab Aceh Barat

Maulizar Alfian¹, Lilis Marlina²

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email : Maulizar.alfian20001@gmail.com¹, lilismarlina@utu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini memiliki maksud guna Mendapati Seperti apa Implementasi sistem Informasi atau yang dikenal sebagai SIPD pada setdakab aceh barat dalam melaksanakan Penelitian ini Peneliti memanfaatkan Jenis Metode Penelitian Kualitatif Lantaran Peneliti bermaksud menyatukan data yang secara faktual dengan menempuh penelitian. Cara ataupun Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah menggunakan cara atau teknik Wawancara, Observasi Serta Cara menganalisis data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini yaitu dengan menghimpun data, menampilkan Data kemudian barulah peneliti menarik sebuah Kesimpulan. Entitas dalam Penelitian melibatkan kantor bupati Atau Setdakab aceh barat, subjek penelitian ini adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian ini Menggunakan Subyek Sistem Informasi Otonomi Daerah (SIPD). Berdasarkan Hasil Penelitian SIPD merupakan sistem online yang memudahkan penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD telah aktif sejak pegawai kantor bupati/Setdakab Aceh barat penerapan aplikasi SIPD ini masih dikatakan lumayan efektif dikarenakan dapat mempermudah penginputan data secara online walupun terkendala dibagian jaringan atau dalam beberapa sistem belum tercover dalam aplikasi ini meskipun 65% penggunaan sistem ini belum bisa menekuni input secara jelas akibatnya dibutuhkan pengamatan dalam penggunaan sistem ini.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.*

Abstract

This research has the purpose of finding out what the implementation of information systems or known as SIPD at the Setdakab of Aceh Barat is in carrying out this research. Researchers use the type of qualitative research method because the researcher intends to gather factual data by taking research. The method or technique of collecting data in this study is to use the method or technique of Interview, Observation and. The way to analyze the data that the researcher uses in this research is to collect data, display the data and then the researcher draws a conclusion. The entity in the study involved the office of the regent or the Regional Secretariat of Aceh Barat, the subject of this study was the Regional Government Information System (SIPD). This study used the subject of the Regional Autonomy Information System (SIPD). Based on the results of research on SIPD is an online system that facilitates the preparation of the planning and budgeting process. In terms of time, SIPD has been active since the employees of the regent/Setdakab office of West Aceh, the application of the SIPD application is still said to be quite effective because it can facilitate online data input even though it is constrained in the network section or in some systems it has not been covered in this application even though 65% of the use of this system has not can pursue the input clearly as a result of which requires observation in the use of this system.

Keywords: *Local Government Information System.*

PENDAHULUAN

Sedianingsih (2014) berpendapat bahwa pengertian SIPD adalah sebuah sistem yang bertujuan dengan maksud untuk mendokumentasi, mengatur, mengolah serta mengelola berkas ataupun data Pembangunan Daerah menjadi suatu informasi yang disediakan kepada khalayak setelah itu barulah tercipta ketetapan atau keputusan pengambilan. Maksudnya adalah agar Stabilitasnya Kegunaan data dan informasi pembangunan daerah.

Menurut Wallang (2007) Sistem Informasi pengembangan wilayah atau lebih dikenal dengan SIPD itu memiliki peran dalam menyokong kegiatan Kepengurusan/ Ketua/ Jabatan/pengurus jabatan / ketua

jabatan/ketua unit kerja yang mendapatkan arahan Serta Data nan Terpercaya dan juga penataan Sistem Informasi Pembangunan Wilayah termasuk dalam cara mempersingkat Pengoperasian Pedoman Presiden No.3 Tahun 2003 yang Membahas Mengenai Penataan skema Politik di pemerintahan Pusat. Pemakaian Sistem Arahan pembangunan dalam Wilayah Terhadap dalam Tingkat Nasional Hingga bisa berdampak Positif dengan Mempersingkat Penerapan E-Governance dan Ilmu Teknologi dalam melancarkan Sistem informasi pembangunan wilayah sudah bisa di gunakan melalui daring atau online dari web online seperti WWW.Sipd.Bangda.Kemendagri.Go.It

Menurut dela alfani (2022) dalam pemanfaatan IT menciptakan suatu Impian manajemen Pemerintah Daerah saat sekarang dan waktu yang mendatang. Akibat diadakannya permendagri no 77 di tahun 2020 secara mekanis mengubah permendagri yang lalu yakni berhubungan dengan patokan Pengoperasian dalam keuangan Daerah. Dalam hal yang keseluruhan SKPD Aceh Barat tidak luput juga bagian pengawasan bagian keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Telah tiada memanfaatkan sistem Aplikasi yang biasa digunakan seperti Pengoperasian Aplikasi "SIMDA" untuk saat ini BPKD Aceh Barat telah memanfaatkan atau mempergunakan pengoperasian Aplikasi SIPD Kepanjangan dari "Sistem Informasi Pemerintah Daerah" seperti yang telah di patok oleh permendagri no 77 di Tahun 2020 yang membahas mengenai arahan cara pengawasan atau pengaturan keuangan daerah.Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa anggaran mempunyai peran penting sebagai pengoperasian Alat Rancangan serta untuk Alat penyelenggaraan. Anggaran pendapatan Dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD merupakan berasal dari pemakaian dana yang Digunakan pemerintahan guna melaksanakan sistem Pemerintah. Dengan Mendata Rekening Belanja Yang sudah Tercantum di Anggaran Pemerintahan, kemudian barulah dipantau bagaimanakah kinerja Anggaran dilaksanakan hingga mendapatkan peran di bagian pengelolaan hingga Penerapan Aktivitas dalam Pemerintahan.

Menurut Djoko (2010) dalam peran pemerintah Daerah mengutarakan Agenda perda,meyakinkan bahwa peraturan Daerah Yang baginya sudah memiliki pembenaran yang senada dengan DPRD Mengusulkan Agenda atau yang biasa disebut rancangan perda yang berhubungan dengan peraturan daerah yakni mengenai APBD secara bersama berserta upaya dalam pelaksanaan tugas Daerah, Menyulih bagian Daerah maupun luar dan dalam validitas pemerintah daerah. Setdakab Aceh Barat menjadi opsi pemerintah daerah yang telah melaksanakan penerapan SIPD yakni "Sistem Informasi Daerah" Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang menyeluruh manfaatnya dalam memajukan efisiensi penerapan di beraneka jenis aturan perbidang pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Menurut Citta Nadyaet 2020 SIPD memiliki fungsi sebagai jaringan untuk menghimpun berkas ataupun Data dalam hal keseluruhan,waktu yang sesungguhnya dititik beratkan dalam hal memakai TI,selaku persetujuan di bagian Perencanaan suatu Program atau Aktivitas hingga pembenahan Pembangunan Daerah ke hal yang lebih logis,ampuh dan terpercaya.teknik ini bisa dipergunakan dengan tujuan yang senada dalam hal fungsi pemakaian data tidak luput dari progresif Pembangunan di berbagai institusi Pemerintahan. Sistem Informasi daerah atau SIPD ini berfungsi pula dalam instrumen kewajiban khalayak guna menguatkan Masyarakat dalam hal pembenahan Kinerja Pemerintahan, Membenahi setiap Agenda-Agenda Pembangunan.Didalam aplikasi sistem informasi daerah (SIPD) salah satunya mengatur mengenai perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan merupakan langkah atau cara guna tercapainya suatu maksud yang ingin dicapai di sebuah Proses Pembangunan hingga akhirnya dapat menciptakan suatu Daerah kedepannya semakin berkembang dengan baik. Suatu perencanaan pembangunan nan elok bisa menanggung terlaksananya Pembangunan secara terpadu. Dalam Perencanaan ini haruslah disenadakan dalam tujuan suatu hal untuk di inginkan supaya sesuatu hal Yang diharapkan dapat Memanifestasikan dalam hal yang sudah direncanakan. Setdakab Aceh Barat adalah contoh Yang sudah melaksanakan upaya Penerapan SIPD ini. Guna untuk menjadi bagian perubahan yang telah di tetapkan Oleh pemerintah senada dalam bagian hal permendagri No. Tujuh Puluh Tahun 2019 yang merupakan suatu Penganti permendagri No. Sembilan puluh delapan Tahun 2019 mengenai sebuah hal yang berkaitan dengan SIPD.

Berdasarkan hasil Survey yang telah Peneliti Laksanakan pada Setdakab Aceh melalui Wawancara dan pengamatan Penerapan SIPD yang berwujud situs WEB memiliki maksud Guna mempersingkat bagian pengerjaan pengelolaan Dan Pembenahan penyajian rakyat Pemerintah di Setdakab Aceh Barat, akan tetapi di bagian pelaksanaan Aktivitas ini agak sedikit sulit oleh karena itu Kerjasama dna kerja keras dlam institusi sangat

diperlukan mengingat penerapan program ini tidak tergolong mudah.

Salah satu fenomena yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan survey yang dilakukan diperoleh bahwasanya Penerapan SIPD yang berbentuk web ini belum bisa Sepenuhnya diterapkan masih ditemukannya

Lambatnya proses pemasukan data di Setiap Bagian Institusi dalam hal tergolong Wajib dalam memasukkan Data Perencanaanya, Terlihat di hasil observasi peneliti Masih terlihat Pegawai dalam pemakaian Aplikasi SIPD ini belum Sepenuhnya mengerti. Aplikasi ini digunakan digunakan untuk operasional keuangan, karna belum semua Terkoneksi, untuk saat ini dalam Hal Pengetikan ataupun Pembuatan SPM “surat perintah membayar. SPP atau Surat Perintah Membayar untuk saat ini Institusi Masih Memakai Aplikasi SIMDA.

SIMDA Keuangan menurut Yuesti, Adnyana & Pramesti (2020) Adalah sebuah Pengoperasian Aplikasi integral Yang di pergunakan Pemerintahan Daerah Guna Mengembangkan Efisiensi yang bertujuan guna melakukan Penerapan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah berlandaskan asas kemampuan, Ekonomi, Positif, nyata dan Akuntabel.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada Setdakab Aceh Barat.

Adapun manfaat dalam penelitian ini, penelitian ini sangat berguna dari sisi pengembangan referensi Semoga bisa dipergunakan dalam penambahan Kajian Referensi Pemikiran Yang Baik Guna menciptakan suatu masalah Sederhana masih dalam ranah berkaitan dengan Judul yang diteliti, manfaat bagi instansi untuk bisa dipakai dalam pemberian bagi penambahan Pemikiran Untuk Membantu Meningkatkan pengetahuan Administrasi Khalayak.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Muhammad irfan Nasution yang meneliti mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau singkatan dari SIPD, penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola keuangan Keuangan dan Aset Daerah atau biasa dikenal dengan BPKAD di kota medan SIPD merupakan suatu Sistem Informasi Yang digunakan di Pemerintahan Kota Medan dimanfaatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kota Medan, Sebagai Sistem Keuangan Daerah dan juga dipergunakan untuk Sistem Pemerintahan lainnya tidak luput juga dari Program Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota medan. Namun Penerapan SIPD Khususnya di kota Medan Belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, Selain itu kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan teknis Menyebabkan banyak SKPD Yang masih belum terbiasa menggunakan SIPD. Penelitian Ini bermaksud untuk Mengetahui Bagaimana SIPD ini diterapkan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan juga menggunakan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan dari Hasil Penelitian menyatakan bahwa BPKAD Kota Medan sudah Menerapkan Pemakaian Aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Melaksanakan Kearifan yang dibutuhkan dalam Menjalankan beraneka ragam Aktivitas yang berkaitan dengan Program dari Pemerintahan Kota Medan. Atas Informasi yang didapatkan, SIPD berguna Dalam proses Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah dan juga dalam proses Pemerintahan Lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Daerah.

A. IMPLEMENTASI

Mulyadi Berpendapat Implementasi Dapat di Artikan Sebagai Perbuatan ataupun Tindakan dengan maksud mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan dalam mengambil sebuah keputusan. Tindakan ini bertujuan agar menciptakan pola-pola Operasional dan akan berupaya dalam mengganti ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dalam segi hakikat Implementasi dapat diartikan sebagai upaya dalam memahami apa yang seharusnya yang telah ditetapkan. Implementasi Merupakan sebuah proses penerapan dalam sebuah keputusan sesuai alur. Di dalam proses tersebut tentunya ada seperti tahapan-tahapan agar proses tersebut berjalan dengan semestinya, Tahapan-tahapan itu yakni : (1) Pengasahan dari aturan perundang-undangan (2) Pengamalan Ketetapan dari institusi Pelaksana (3) Kelompok memfasilitasi kesediaan target atau sasaran guna menjalankan sebuah ketetapan (4) efek real dari keputusan yang baik yang telah dikehandaki maupun tidak (5) terakhir efek dari ketetapan yang telah di harapkan oleh institusi (6) Solusi Perbaikan yang berkaitan dengan ketetapan atau aturan perundangan. Dalam melaksanakan Implementasi tentunya mempunyai yang dikatakan dengan persiapan di antaranya (a) memfasilitasi kesediaan sumber daya dan unit serta metode (b) Penafsiran Aturan yang telah terencana sesuai dengan arahan yang telah dilaksanakan (c)

Terfasilitasinya layanan dan pembayaran yang dilakukan secara rutin.

Horm (Tahir,2014.55) mengemukakan bahwa implementasi merupakan sebagai tindakan-tindakan yang kerjakan oleh kepribadian atau penjabat-penjabat atau Kumpulan team Baik pemerintah maupun Swasta dipedomani guna mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dalam aturan.

Sedangkan Oktasari (2015,13) mengemukakan bahwa Implementasi atau To Implement artinya mengimplementasikan. Implementasi Yakni Sebuah kesediaan Sarana dalam Menjalankan sesuatu hal dengan maksud menimbulkan dampak ke dalam sesuatu. Yang di maksud dengan sesuatu itu adalah untuk menimbulkan efek atau dampak seperti undang-undang, Aturan Pemerintah, Ketetapan aturan Pemerintah, Kebijakan keputusan Peradilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Meter dan Horn (Ratri.2014) Implementasi Adalah Peraturan Publik atas perbuatan-perbuatan yang diperbuat perseorangan bisa juga perkelompok baik itu Pemerintah maupun Swasta dalam arahan guna menggapai impian-impian yang sudah dipandu agar impian-impian tersebut tercapai seperti yang telah di ajukan seperti aturan sebelumnya.Maksudnya ialah tahapan Implementasi ini tidak akan berjalan jikalau undang-undang dan aturan belum ditetapkan serta belum terfasilitasi dana dengan tujuan supaya proses implementasi ini berjalan. Sedangkan dalam artian lain implementasi di anggap seperti keunikan yang sederhana yang berkemungkinan bisa dimengerti dalam proses Ouput dalam kata lain adalah hasil.

Widodo (2013:230) Mengemukakan implementasi adalah salah satu kebijakan publik dan juga mencakup bidang studi yang lebih penting.kenapa bersifat penting diakibatkan oleh kebijakan,jikalau tidak ada perencanaan secara yang baik dalam pengimplementasian maka akibatnya tujuan aturan yang inginkan tidak akan kesampaian.Oleh karena itu,jika ingin mewujudkan Tujuan dari kebijakan yang diharapkan dengan semestinya, sudah seharusnya yang dipersiapkan itu bukan saja pada tahap implementasi akan tetapi haruslah mengabungkan persiapan dan perencanaan yang baik. Tetapi tidak luput juga dari perumusan atau kebijakan yang telah dibuat dan di antisipasi supaya dapat di implementasikan.

Meter dan Carl (pratama,2013.230) mendefinisikan yang dimaksud dengan implementasi itu adalah suatu aturan yang menitik beratkan pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Swasta yang dipandu guna keinginan dalam tujuan-tujuan yang telah dilaksanakan seperti sebelumnya,berupaya dalam merubah ketetapan-ketetapan yang akan membentuk model Oprasional lalu menyambungkan upaya-upaya tersebut. Guna mengapai Perubahan,besar dan baik atau kecil yang sudah diberitahukan oleh ketetapan-ketetapan aturan tertentu.

Zulfian (2019) Mengemukakan Yang di maksud Model pendekatan Implementasi Kebijakan Van meter bersama temanya Van horn telah merumuskan A Model of the policy implemention maksudnya adalah dalam sebuah proses Implementasi yang bersifat abstrak ataupun penampilan dalam pelaksanaan kebijakan pada umumnya dilakukan dengan cara yang disengaja guna tujuan meraih Kinerja Implementasi Kebijakan yang Tinggi dan berlangsung dalam ikatan yang berkaitan dengan berbagai variabel. Model ini juga mengumpamakan implementasi merupakan aturan yang berjalan dengan cara Linear berdasarkan keputusan Pemerintah. penyelenggara serta dan kinerja Aturan publik dalam jenis Model Ini Menjelaskan yang mempengaruhi kinerja kebijakan merupakan dari beberapa Variabel yang saling Berhubungan Variabel-Variabel itu Yakni:

1. Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

B. PENGELOLAAN

G.r terry (Hartono.2016) Berpendapat makna pengelolaan adalah tahap khusus yang terdiri dari Perbuatan-Perbuatan perencanaan,Koordinasi,mobilitas serta pengawalan nan dilaksanakan dalam memilih serta menggapai target yang sudah ditetapkan melewati pedayagunaan Sumber Daya Manusia atau sumber daya yang berasal dari lainnya.

Definisi Pengelolaan menurut pascalino (2021) adalah berasal dari prafrasa "Management" terdorong oleh aliran interpolasi mengangkat kata ke dalam bahasa indonesia, dalam istilah bahasa inggris itu di ubah ke indonesia menjadi manajemen. Kata Manajemen berasal dari kata Inggris yakni To Manage terjemahnya ialah mengatur, maksud mengatur disini ialah perlu dihadapi tahapan kemudian dioperasikan sesuai rangkaian nan Kaidah-Kaidah Manajemen. Maka manajemen bisa dikatakan berupa suatu tahapan maupun langkah dalam mencapai inpiian yang ingin digapai. Dari aspek-aspek yakni rencana,Organizing,Actuating dan

Controlling. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkang tertera bahwa definisi pengelolaan adalah suatu tahap dan proses atau bisa juga disebut cara tindakan mengusahakan proses yang dilaksanakan tertentu dalam kegiatan memotivasi orang lain, tahapan yang menyokong dalam hal merumuskan kebijaksanaan hingga maksud Tujuan Organisasi atau proses yang mempersembahkan pemeliharaan dalam semua hal yang terhubung di kegiatan penerapan kebijaksanaan dan keinginan Tujuan tercapai. Pada hakikatnya Pengelolaan dapat diartikan sebagai aktivitas yang mengganti sesuatu lalu menjadi tanggung jawab yang mempunyai makna kemudian menjadi baik berat mempunyai Makna-makna yang tinggi dari awalnya. Pengelolaan dapat juga disebut sebagai kegiatan yang membuat sesuatu hal dengan tujuan sesuatu hal itu selaras hingga cocok dalam kepentingan yang lebih berguna.

Sedangkan berdasarkan pendapat Nugroho (2003:119) pengelolaan itu secara istilah yang dipergunakan didalam manajemen. Kemudian secara Etimologi istilah Pengelolaan itu berasal dari kata “kelola” atau to manage kata tersebut biasanya merujuk di tahapan mengurus atau mengatur sesuatu guna meraih keinginan yang ingin dituju. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan itu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan tahap atau proses yang mengelola dan menangani sesuatu guna menciptakan maksud keinginan yang diharapkan.

C. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

Irfan dengan Nurwani (2021) mengemukakan terciptanya transparansi informasi yang telah tercantum didalam undang-undang No 14 tahun 2008 terkait transparansi Informasi publik yang menanggung masyarakat dalam mengakses kabar secara umum merupakan ketentuan minimal yang setidaknya memang diharuskan terpenuhi dari Sistem informasi pemerintahan daerah. Good governance merupakan salah satu yang berhubungan dengan keterbukaan yang di tingkatkan atas dasar keleluasaan arah informasi sangat mengharuskan melakukan transparansi keterbukaan kabar atau biasa disebut informasi. Maksud ditanya SIPD adalah guna pengelolaan Informasi Daerah secara bisa dilaksanakan secara profesional seperti yang tertera di dalam undang-undang No 23 2014 hingga pemerintah daerah yang mengharuskan memfasilitasi informasi pemerintahan atau Informasi Pemerintah daerah dan keuangan daerah, disitu juga menyajikan dan menata Informasi Pemerintahan daerah lainnya. Selain itu terdapat juga tuntutan di dalam tahap Perencanaan Pembangunan Secara Nasional dan mengenai transparansi Kabar publik hingga menciptakan pemerintah termotivasi didalam hal perencanaan Pembangunan. Kemudian Munculah permendagri No 70, 2019 yang didalamnya terkait mengenai sistem informasi pemerintahan daerah yang mengelola tatacara penataan ataupun pemakaian SIPD yang senada dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat dan industri pada masa sekarang.

Pengelolaan pemerintah yang bermotif SPBE secara menyeluruh nasional yang bersifat penting dalam mencapai Good governance hingga menciptakan data Indonesia yang terpadu secara terpercaya beserta hingga menyatu dimulai di daerah sampai pusat. Dalam hal itu, dikeluarkanlah permendagri No 70 tahun 2019 yang mengelola bentuk SIPD yang bisa ditingkatkan pemerintah daerah hingga terbentuk beberapa kelompok seperti :

1. Informasi pembangunan daerah SIPD dalam sistem informasi pemerintah daerah sanggup mengelola informasi dan data yang berhubungan dengan bagian Perencanaan pembangunan daerah yang ikut menyeret bermacam komponen yang bersangkutan. Sistem pemerintahan Daerah juga menyangupi dalam menyediakan penataan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah, rencana strategis, perusahaan daerah dan rencana kerja perangkat daerah kemudian menganalisis serta profil asal pengerjaan pembangunan daerah gampang didapati, hingga sanggup membuat awal dari inovasi data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Keadaan ilmu permukaan bumi daerah, Demografi, potensi sumber daerah, keadaan keuangan dan ekonomi daerah, kemakmuran rakyat, daya saing daerah hingga pelayanan yang bersifat umum merupakan informasi yang terdapat didalam perencanaan pembangunan Daerah.
2. Informasi keuangan daerah SIPD sanggup mengelola data Keuangan Daerah dari bermacam komponen yang berhubungan dengan cara yang lebih baik dan efisien tapi tetap mengamati

fondasi akuntabilitas secara terbuka. Didalam kegiatan proses pengaturan Keuangan daerah nan berarti diantaranya:Perencanaan anggaran daerah,penata usahaan keuangan,pelaksana dan pelaporan keuangan,pertanggung jawaban penyelenggara Keuangan daerah dan barang daerah, hingga penanggungjawaban data keuangan daerah itu merupakan salah satu hal yang sangat berarti terutama guna menghindari adanya aktivitas kesalahan menggunakan kekuasaan khususnya bagian keuangan daerah. Kode dan Pos dalam anggaran kemungkinan akan diperluas lingkup pencariannya secara lebih mendetail dengan dibuatkan nya seperti peta lalu dikerjakan secara tepat, kemudian menciptakan informasi yang lebih terpercaya dan juga cepat. Didalam kode kegiatan ini bisa sangat membantu dibagian peleburan data keuangan daerah dibagian sistem informasi pemerintah Pusat lebih-lebih di bagian penyampaian laporan pertanggungjawaban.

3. Didalam SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah ini menyanggupi memberikan informasi yang bersifat umum dalam hal lainnya yang berhubungan dibagian pelaksanaan pemerintahan.Informasi umum itu bisa berwujud laporan atas pelaksanaan pemerintah daerah atau LPPD dalam jangka tempo satu tahun peraturan daerah dan juga informasi umum lainnya nan diatur oleh berbagai komponen yang bersangkutan.

METODE

Penelitian Ini memanfaatkan jenis Penelitian Pendekatan Kualitatif.berdasarkan pendapat Saifiliah walidin dan tabrani (2015.77) bahwa didalam Penelitian Kualitatif merupakan sebuah Tahapan Penelitian dengan tujuan Memahami keunikan ataupun Fenomena-fenomena Manusia atau Sosial dikarena menghasilkan sketsa secara menyeluruh dan sederhana nan bisa disediakan melalui kata-kata dengan dilaporkan dengan cara lebih mendetail dan juga data berasal dari sumber informan dan juga dilaksanakan didalam Latar Setting dengan cara Alamiah. Didalam Buku Moleong Tylor dan bogan mengemukakan didalam Penelitian Kualitatif adalah anggapan atau hasil yang berasal dari kata-kata yang tertulis dan menghasilkan data yang berbentuk Dekriptif beserta bisa diperhatikan oleh Peneliti demi suatu permasalahan yang ingin diteliti.

Didalam Penelitian ini Memanfaatkan Informan adalah orang-orang yang bisa menyediakan Informasi dengan lebih terpercaya dan juga memiliki peran tanggung jawab dalam mengatur aplikasi SIPD ini.Berikut Informan yang Peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini:

1. Sub Koordinasi Perencana di Kantor Setdakab Aceh barat.
2. Staf Anggaran setdakab Aceh Barat.

Didalam bagian Fokus penelitian merupakan hal penting didalam penelitian dikarenakan Focus Penelitian bisa mempermudah para peneliti untuk melakukan Penelitiannya. Di penelitian Kualitatif Ini ada hal yang sangat perlu diamati yakni bagian Masalah dan Focus Penelitian.Tujuan dari Focus ini yakni batasan didalam akumulasi data. Akibatnya jika ada focus ini par peneliti akan mampu memahami masalah yang terjadi. Beralaskan Pemikiran yang diatas maka yang menjadi Focus didalam Penelitian ini yakni : bagaimana Implementasi kebijakan didalam Pengelolaan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD di Setdakab Aceh Barat ini memanfaatkan Teori dari Implementasi berdasarkan pemikiran Van Meter Dan juga Horn yakni :

1. Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi Pelaksanaa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah berpendapat bahwa didalam SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini dapat menyokong didalam Proses Anggaran Serta perencanaaan pemerintahan Daerah,Meski diawal penerapannya tergolong sulit. saat awal penerapan nya aplikasi web ini diterapkan di Setdakab Aceh Barat diterapkan akhir tahun 2019.menurut hasil penelitian dilapangan,pegawai yang berperan dalam pengoperasian aplikasi dengan berbentuk web ini (SIPD) di Setdakab aceh barat 65% masih belum sepenuhnya Paham Mengenai Pemakaian SIPD Atau Sistem informasi Pemerintahan Daerah tersebut.ini sudah di uji bersumber dari hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Bupati/Setdakab Aceh Barat, Antara lain Beliau menekuni bidang pemanfaatan atau

Pengoperasian Sistem Pemerintahan Daerah ataupun sebagai koordinator perencana Tersebut.YI berpendapat bahwa Sistem Informasi pemerintahan daerah Atau SIPD itu merupakan sebuah sistem Perencana yang masih tergolong Baru yang dikeluarkan Oleh Kemendagri,namun dalam penggunaanya belum semua bisa terkoneksi.untuk saat ini dalam proses pembuatan SPM dan SPP masih menggunakan Aplikasi SIMDA,hal itu dikarenakan terkendala di bagian jaringan yang sering error dalam proses penginputan rincian belanja".YL juga mengatakan "bahwa dalam aplikasi SIPD komponen belanja belum lengkap,misalnya kita mau belanja drone seharga 23jt,tapi komponen ini tidak tersedia di aplikasi SIPD,jadi untuk menglopkan pagu anggaran kita harus mencari komponen lain yang seharga 23jt,bagaimana agar drone itu ada dalam SIPD caranya kita harus mengajukan komponen ini ke BPKD meliputi tahapan yang panjang,sehingga disetujuiilah komponen yang kita maksudkan baru setelah itu ada dalam aplikasi tapi, hal ini tidak efektif karena membutuhkan waktu lama melebihi waktu yang disediakan untuk proses inputan data.menurut YL "keuntungan pemakaian aplikasi ini tidak ada terlalu sulit dan memakan waktu yang lama dalam pemakaiannya ".

Selanjutnya berdasarkan menurut YN yang bertugas di bagian Staf Anggaran Setdakab Aceh Barat mengatakan "SIPD itu ada plus minusnya untuk kantor,diaman dengan menetapkan SIPD jadi memudahkan pekerjaan.karena menggunakan sistem jaringan online.tapi, untuk saat ini ada minusnya juga, belum tercover semua dengan SIPD untuk perencanaan belum bisa ke penatausahaan.terus minusnya juga ada dengan jaringan yang tidak stabil dan juga tidak tersedianya beberapa komponen yang akan dipilih sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga menghambat proses pengimputan data ke SIPD.YN juga mengatakan "bahwa pemakaian SIPD hanya sesuai kebutuhan saja".Beralaskan hasil Observasi tersebut, Maka Peneliti bisa Menyimpulkan bahwa Keadaan pegawai Aceh Barat dalam Penggunaan SIPD ini sangat bermanfaat dan merasa terbantu dengan adanya aplikasi SIPD ini hanya saja di instansi tersebut belumlah sepenuhnya memahami penggunaanya secara Terpadu.Jadi agar tahu sudah Sejauh apa pengoperasian SIPD untuk itu Peneliti Memanfaatkan Atau menggunakan Jenis Focus Penelitian Menurut Pemikiran Van meter bersama Van Horn yakni:

1. TUJUAN KEBIJAKAN

Didalam Pengimplementasian menunjukkan Bahwasanya Kantor Bupati/Setdakab Aceh Barat Sudah Menerapkan Sistem Aplikasi yang berbasis Web Tersebut web ini atau yang dikenal Sebagai SIPD dengan tujuan untuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan didalam melaksanakan bermacam jenis Aktivitas yang telah menjadi bagian Program Setdakab Aceh Barat.SIPD ini tergolong aplikasi baru yang pasti dalam penerapannya mengalami beberapa kendala yang didapatkan saat menggunakan aplikasi SIPD ini.

2. SUMBER DAYA

Didalam sebuah Sumber Daya Manusia nan elok maka dapat merubah Kemajuan suatu program di instansi hasil penelitian Yang dilakukan Setdakab Aceh Barat mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia telah memenuhi standar dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan riset yang dilakukan di Kantor Bupati/Setdakab Aceh Barat terlihat yang melakukan pengoperasian aplikasi SIPD ini masih berusia muda dan memiliki potensi dalam pengoperasian aplikasi SIPD ini,adapun sumber daya sarana dan prasaran telah termasuk tercukupi dan memadai sudah tersedianya Koneksi Jaringan internet, perangkat Komputer Hingga Berbagai Alat yang Membantu memudahkan para staf berkerja akibatnya Kantor Bupati/Setdakab Aceh Barat tidak perlu memikirkan kendala saat proses pengimputan data walau masih ada beberapahal yang kurang ataupun permasalahan saat pemakaian aplikasi SIPD tersebut.

3. KARAKTERISTIK ORGANISASI PELAKSANA (BELUM)

Peran penerapan suatu program sangat diperlukanya dengan yang namanya kerjasama hal ini bertujuan untuk mewujudkan Koordinasi arahnya sudah tentu jelas alurnya terarah didalam menunjang Kesuksesandalam sebuah program aktivitas..Setdakab aceh Barat sangat bertanggung Jawab didalam tahap Implementasi SIPD yang dimana Orang Nan Ikut Serta didalam pelaksanaanya memiliki kewajiban dalam mencapai bobot dibagian Pembangunan supaya kualitas Perencanaan Daerah serta sistem keuangan berjalan dengan semestinya Pengimpelmentasian serta penerapan aplikasi berbasis web ini berjalan hampir dengan semestinya dilihat di berbagai teori dan kemampuan didalam bagian Sumber Daya Manusia Yang terbilang cukup dan juga fasilitas prasarana bersama Sarana juga memadai.akan tetapi dengan Jalanya Penggunaan SIPD ini ternyata Masih terdapat Kendala dan Kekurangan di bagian Pengimplementasi contohnya Telatnya penginputan Data dikarenakan kendala sistem error dikarenakan jaringan ataupun dalam SIPD ini belum semua data terkoneksi

dalam SIPD ini.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari riset peniliti laksanakan pada Setdakab Aceh Barat,terkait dengan Fenomena Yang telah terjadi penulis jabarkan maka dapat di ambil kesimpulan SIPD ini adalah sebuah Sistem yang Berbasis Daring serta Membuat Staf Menjadi Mudah di penyusunan sebuah tahap ataupun proses Perencanaan serta Penganggaran. Dapat Diamati dari diterapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini mempermudah pegawai menginput data secara online walaupun masih banyak kendala yang didapati dalam pemakaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- agostiono, implementasi kebijakan publik model van meter dan van horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 september 2010, hlm 139.
- dela alfani, 2022 implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera utara article sidebar vol.6
- djoko, s. 2010. corporate overnance karakteristik perusahaan. 6 , 39-69.
- hartono, manajemen perpustakaan sekolah, (yogyakarta: ar-ruzz media, 2016), h. 26
- muhammad irfan nasution, nurwani analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (sipd) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) kota medan jurnal akuntansi dan keuangan volume 9, nomor 2, agustus 2021
- mulyadi, 2015 studi kebijakan publik dan pelayanan publik ,bandung ,alfabeta
- nugroho, riant dwijodijoto. 2003. kebijakan publik: formulasi, implementasi, evaluasi, jakarta : pt.elex media komputindo kelompok gramedia.
- pascallino julian suawa, manajemen pengelolaan dana revitalisasi danau tondano oleh pemerintah kabupaten minahasa (studi kasus di balai wilayah sungai sulawesi) sekretariat: jurusan ilmu pemerintahan fispol unsrat gedung c lt. 2, jl. kampus unsrat, bahu manado
- se sedianingsih, ef mustikawati, np soetanto, 2014 teori dan praktik administrasi kesekretariatan prenatal media tim dosen administrasi pendidikan universitas pendidikan indonesia 2013, manajemen pendidikan, (bandung: alfabeta, ,
- walidin, w., saifullah, & tabrani. (2015). metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. ftk ar-raniry press.
- wiyono, p., & budiati, a. (2021). analisis perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan. jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, & akuntansi),
- yuesti, a., adnyana, i.m.d., pramesti, i.g.a.a. 2020. management information systems and the quality offinancial statements in local goverment. journal public affairs, 2462.
- zulfian, implementasi kebijakan program pendataan keluarga sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di kabupaten sintang, jurnal administrasi publik dan birokrasi vol. 1 no. 2, 2014, artikel 4